

Perekonomian Indonesia: Prediksi Pra dan Pasca Pemilu 1999



Harun Rasyid

Wajah perekonomian nasional pasca pemilu 1999 masih akan diwarnai oleh berbagai masalah krusial. Oleh karenanya, di masa mendatang, harus ada reorientasi kebijakan pembangunan yang bisa memberikan akses lebih besar pada lapisan bawah dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Dalam kaitannya dengan kecenderungan perekonomian yang semakin terbuka, perekonomian Indonesia harus menyiapkan infrastruktur dan kebijakan politik yang benar-benar sejalan dengan liberalisasi.

Tahun depan, tepatnya pada bulan Mei atau Juni bangsa kita sudah mengadakan pemilu, yang merupakan pintu pembuka untuk melanjutkan pembangunan pada milenium baru. Karena dua tahun mendatang, milenium baru, milenium ke-3 akan segera kita masuki. Adanya pergantian masa yang khusus, yaitu pergantian milenium masa 1000 tahun, serta pergantian abad ke 20 menjadi abad ke-21. Bagi mereka yang percaya pada simbol-simbol atau mitos-mitos seringkali dijadikan masa akan terjadinya hal-hal yang khusus pula. Masa itu dijadikan titik tolak untuk melakukan sesuatu.

Namun demikian, dalam memasuki abad mendatang yang merupakan abad globalisasi, apakah kita percaya pada mitos dan simbol atau tidak, secara kebetulan sebagai akibat suatu proses berkelanjutan banyak hal-hal yang secara khusus dan berbeda dengan masa sebelumnya akan terjadi. Dengan berbagai lompatan teknologi yang terjadi selama ini. Hal-hal yang baru akan terjadi pada abad ke-21. Hal mengenai bioteknologi misalnya, saat ini sedang menggema di seluruh dunia, yakni masalah cloning pada manusia, walaupun masih terdapat kontra dan pro ditinjau dari etika pengetahuan.

Dalam bidang ekonomi, suatu hasil dari proses perkembangan ekonomi dunia yang ada selama ini, juga akan semakin mewujud pada abad ke-21. Yang paling nyata dan sebentar lagi terwujud adalah proses Globalisasi Ekonomi. Batas-batas negara menjadi kabur dan hilang karenanya, lalu lintas barang, jasa, maupun modal semakin bebas. Pasar yang ada hanya satu, yaitu *Pasar Global*. Orang tidak lagi bicara tentang modal asing atau modal domestik. Siapa pun yang mempunyai modal dengan leluasa keluar masuk bebas tanpa hambatan

untuk mencari tempat investasi yang menguntungkan tanpa adanya pembatas.

Pernyataan yang perlu dijawab oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kondisi ekonomi dan kesiapan bangsa dalam menghadapi segala kemungkinan perubahan tersebut? Apakah mampu pemerintahan hasil pemilu mendatang menjawab tantangan dan peluang di abad ke-21? Dengan kondisi demikian pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1999 merupakan momentum penting sebagai jembatan masuknya milenium baru, milenium ketiga abad ke-21.

Apabila kita mencermati data makro-ekonomi yang ada, serta kondisi mikro-ekonomi yang dapat dipandang secara kasat mata saat ini, gambaran yang ada menunjukkan bahwa banyak persoalan-persoalan yang secara fundamental dan struktural yang merupakan peninggalan rezim orde baru masih dihadapi bangsa kita sekarang ini sebelum memasuki pemilu 1999. Dan menjadi pelajaran bagi penentu kebijakan bagi pemerintah hasil pemilu mendatang. Persoalan-persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah:

- (1) kolusi dan korupsi yang memberikan inefisiensi ekonomi dan merupakan peninggalan pemerintah orde baru,
- (2) kemiskinan dan kesenjangan pendapatan,
- (3) pembiayaan pembangunan dan utang luar negeri,
- (4) pengelolaan sumber daya alam dan ketergantungan terhadap komponen impor,
- (5) kesiapan menuju era pasar bebas, dan
- (6) masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai akibat derasnya pembangunan ekonomi itu sendiri.

Persoalan-persoalan di atas masih terjadi sebelum dan sesudah pemilu. Dan tentunya pemerintah baru harus "membereskannya" dan

juga merupakan sinyal penentu keberhasilan bagi pemerintahan yang terbentuk hasil pemilu tahun mendatang. Persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas masih terus membayangi sebelum dan sesudah pemilu. Namun demikian bagaimana wajah perekonomian tersebut setelah pemilu? Tulisan ini merupakan prediksi dan estimasi terhadap perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang terutama pasca pemilu 1999.

KORUPSI DAN KOLUSI

Masalah korupsi dan kolusi merupakan hal yang memang sulit dihilangkan. Walaupun demikian masih dapat dikurangi. Budaya ini sudah mendarahdaging di dalam kehidupan berbangsa di negara kita, dan ini berdampak pada sistem perekonomian Indonesia yang berada di bawah pemerintahan orde baru selama 32 tahun. Ditilik dari lamanya maka memang sulit sekali memberantas budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme bila tidak ada *Political Will* dari pemerintah.

Setelah terjadi reformasi sekarang ini maka budaya ini harus dihilangkan. Budaya yang dibangun oleh orde baru ini, sudah kuat di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan kekuatan moral dari gerakan mahasiswa maka budaya ini harus dihilangkan dan runtuhnya kekuasaan orde baru memberikan peluang terjadinya pembersihan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

MASALAH KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

Persoalan ini merupakan aspek kesenjangan ekonomi yang merupakan peninggalan dan

warisan dari pemerintahan sebelumnya. Di mana pertumbuhan ekonomi lebih dipentingkan ketimbang pemerataan ekonomi. Akibatnya terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Pada pemerintahan orde baru yang di bawah kepemimpinan Soeharto dengan jelas terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin sangat menganga lebar. Di masyarakat terjadi ketimpangan ekonomi antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Namun tidak berarti bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini adalah tidak banyak manfaatnya bagi si kecil. Karena kenyataannya telah terjadi peningkatan kemakmuran sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang kaya sudah semakin kaya, yang miskin pun bertam-

bah kaya. Hanya saja terjadi perbedaan dalam kecepatan peningkatan pendapatan tersebut, sehingga muncul persoalan kesenjangan dalam masyarakat. Dan tampaknya masalah kesenjangan ini akan masih merupakan persoalan

bagi pemerintahan yang baru, walaupun mungkin keberpihakan terhadap ekonomi rakyat makin besar proporsinya.

Problem yang harus diatasi adalah dalam hal penyediaan kesempatan kerja dan ketimpangan pendapatan, maka kebijakan yang harus diambil dan perlu mendapat tekanan adalah bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan secara menyeluruh, yang dibarengi dengan penurunan pengangguran serta peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Apakah masih terjadi proses transformasi yang parsial dari perekonomian makro kita? Apabila jawabannya adalah ya maka sektor per-

***Ditilik dari lamanya
maka memang sulit
sekali memberantas
budaya korupsi, kolusi,
dan nepotisme bila tidak
ada Political Will dari
pemerintah.***

tanian akan tertinggal sedangkan sektor industri akan maju. Namun bila kita setback atau melihat ulang dari krisis moneter yang terjadi maka sektor industri yang bahan bakunya berasal dari komponen impor merupakan biang keladi amburadulnya sistem perekonomian kita. Untuk itu maka pemerintahan yang baru nanti harus mencermati pembangunan sektor mana yang harus ditekankan apakah sektor pertanian atau sektor industri. Maupun ekonomi konglomerasi atau ekonomi kerakyatan.

Apabila kita lihat pembangunan pada orde baru bahwa terjadi pertumbuhan pesat di sektor industri dan jasa, namun sektor pertanian, walaupun tumbuh tetapi angkanya relatif kecil. Dari sisi *output* ini, maka transformasi struktural kita berhasil, karena struktur ekonomi kita tidak lagi didominasi sektor pertanian. Sektor tradisional ini kita hanya memberikan kontribusi 17,19% dari total PDB, sementara industri sudah 24,8%.

Masih terjadinya kesenjangan sebenarnya tidaklah terlalu mengganggu seandainya lapisan bawah masyarakat Indonesia sudah dapat menikmati segala kebutuhan dasarnya secara layak. Ketimpangan terjadi di mana-mana, termasuk di negara sosialis ataupun kapitalis. Namun persoalannya adalah, ketimpangan yang ada di tanah air saat ini masih dibarengi banyaknya jumlah penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Melihat sejarah, data, dan fakta yang ditinggalkan oleh zaman orde baru maka wajar jika muncul suatu rekomendasi bahwa di masa selanjutnya harus ada reorientasi pembangunan

yang bisa memberikan akses lebih besar pada lapisan bawah masyarakat ini dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Artinya,

kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baru haruslah secara nyata bisa dan memihak kepada yang kecil agar pertumbuhan pendapatannya bisa relatif lebih cepat dan dapat memperkecil jurang pendapatan kaya-miskin dan yang besar-kecil ini.

Masalah kemiskinan masih tetap merupakan persoalan yang tidak henti-hentinya menjadi titik fokus pembangunan ekonomi mendatang. Karena imbas krisis moneter maka penduduk miskin Indonesia bertambah banyak.

Pandangan demikian selayaknya harus dimunculkan karena selama zaman pemerintahan orde baru hampir semua fasilitas dan kemudahan lebih gampang diperoleh lapisan atas masyarakat ketimbang yang lapisan bawah. Misalnya saja dalam dunia usaha, fasilitas-fasilitas kredit, proteksi, ataupun proyek-proyek pemerintah, lebih dinikmati pengusaha besar dibandingkan yang kecil. Akibatnya, pertumbuhan usaha besar pun jauh lebih pesat ketimbang yang kecil sehingga memunculkan persoalan kesenjangan dengan berbagai dampak sosial ekonominya.

Masalah kemiskinan masih tetap merupakan persoalan yang tidak henti-hentinya menjadi titik fokus pembangunan ekonomi mendatang. Karena imbas krisis moneter maka penduduk miskin Indonesia bertambah banyak. Menurut PBB penduduk miskin Indonesia pada tahun 1998 ini berkisar 80 sampai 100 juta orang (Tabel 1). Sangat fantastik sekali. Akibat krisis dan melemahnya rupiah maka bertambah pula penduduk miskin. Mereka ini secara ekonomis mungkin belum merasakan benar nikmatnya kemerdekaan sebagaimana

sebagian rakyat Indonesia lainnya. Mereka ini hidup jauh dari memadai, karena standar garis kemiskinan tersebut sangat rendah apalagi ditambah dengan krisis moneter dan melemahnya rupiah.

cerah sebagai pendukung bangkitnya ekonomi Indonesia. Apalagi sektor pertanian ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja pedesaan.

Tabel 1 Penduduk Miskin Indonesia 1993-1996

Wilayah	1993		1996		Penurunan	
	Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	(ribu)	%	(ribu)	%	(ribu)	%
Sumatera	5.053,6	12,87	4.246,1	10,15	807,4	15,98
Jawa-Bali	14.765,6	12,84	12.826,6	10,75	1.939,0	13,13
Kalimantan	2.008,8	20,17	1.658,7	15,35	350,0	17,43
Sulawesi	1.320,1	9,94	1.204,5	8,59	115,5	8,75
Maluku dan Irian	2.662,5	22,86	2.514,7	20,33	147,8	5,55
Indonesia	25.900,0	13,67	22.493,7	11,34	3.406,3	13,35

Sumber: BPS 1997

Bagaimana caranya pemerintah yang baru nanti melakukan pemerataan ekonomi atau pendapatan rakyat, misalnya dalam soal pertanian? Bagaimana bisa mengusahakan agar petani-petani kita memiliki daya beli, dengan cara harga jual hasil pertanian diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga mereka mempunyai *output* yang lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab oleh pemerintahan nantinya dan harus merupakan kebijakan yang harus dipegang.

Dari pengalaman pembangunan yang dilaksanakan oleh orde baru maka haruslah diubah mengenai arah pembangunan. Janganlah mementingkan pertumbuhan tanpa adanya pemerataan. Prinsip konglomerasi harus dihilangkan. Tentu saja harus ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam konsep pemerataan ekonomi rakyat, terutama sektor pertanian. Sebab, sektor inilah yang mempunyai prospek

GLOBALISASI EKONOMI

Problematik yang berupa tantangan lain yang harus dihadapi oleh perekonomian mendatang dan kita harus bersiap-siap adalah berkaitan dengan kecenderungan perekonomian dunia yang semakin terbuka. Sebagai bagian dari perekonomian global, maka mau tidak mau Indonesia harus juga lebih meliberalkan perekonomiannya. Lebih-lebih secara formal konsep tersebut dilegitimasi lewat berbagai kesepakatan ataupun perjanjian internasional, baik di tingkat regional maupun global, seperti wadah/forum AFTA, APEC, dan WTO sehingga relatif mengikat negara-negara yang menandatangani untuk melaksanakan berbagai komitmen yang pada hakikatnya mendorong terjadinya suatu liberalisasi ekonomi tersebut. Ini berarti memberikan peluang pada suatu persaingan ekonomi yang lebih bebas ketimbang masa sebelumnya.

Dengan demikian maka persoalannya bukan lagi berbuat pada mau atau tidak mau menerima liberalisasi ekonomi ini, atau mem-persoalkan kesiapan kita menghadapinya, melainkan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan dan aktivitas ekonomi kita berhadapan dengan persaingan ekonomi yang semakin bebas di arena ekonomi global itu. Perekonomian Indonesia nantinya haruslah menyiapkan infrastruktur politik dan kebijakan politik yang benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip liberalisasi.

Adanya iklim yang kondusif untuk mendukung liberalisasi ekonomi sehingga distorsi

Apabila kita ingin berbicara banyak dalam pasar global, mau tidak mau distorsi yang menghalangi *fair competition* haruslah dihilangkan. Sudah saatnya proteksi bagi industri yang tidak efisien dan jago kandang dihilangkan, setidaknya dikurangi porsinya.

dan kerugian ekonomi dapat dihindari. Oleh karenanya, untuk mewujudkan suatu aksi ekonomi yang proyektif, yang mendukung pengembangan ekonomi nasional yang berwasan ke depan dan sejalan dengan kecenderungan perekonomian dunia saat ini, maka infrastruktur politik yang mendukung perlu diwujudkan terlebih dahulu. Dan memang, sebagaimana banyak dikemukakan oleh pakar ekonomi pembangunan, suatu reformasi ekonomi perlu didahului dengan suatu reformasi politik. Kebijakan politik pemerintah haruslah mendukung kebijakan ekonomi sehingga kekuasaan bukanlah sebagai alat untuk memper-

mainkan sistem perekonomian-Indonesia. Janganlah Kue Nasional hanya dinikmati oleh segelintir atau segolongan kelompok. Namun dengan kebijakan politik maka kue nasional haruslah terbagi merata.

Bagaimana strategi untuk menghadapi pasar global tersebut? Salah satunya adalah perlunya perbaikan struktur industri kita, terutama dalam hal penggunaan komponen impor.

Apabila kita ingin berbicara banyak dalam pasar global, mau tidak mau distorsi yang menghalangi *fair competition* haruslah dihilangkan. Sudah saatnya proteksi bagi industri yang tidak efisien dan jago kandang dihilangkan, setidaknya dikurangi porsinya. Momentum liberalisasi perdagangan dunia dan disepakatinya WTO agaknya merupakan *external pressure* untuk meniadakan berbagai proteksi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini perlu dibarengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur dan suprastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar global. Pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategik yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan tidak hanya berhenti pada retorika politik semata.

Menurut Basri dan Kuncoro (1996) menyatakan bahwa agar dapat bersaing di pasar global, sudah saatnya iklim persaingan di dalam negeri dibenahi. Struktur industri Indonesia yang umumnya oligopolistik dan terkonsentrasi, terbukti hanya jago kandang. Pada gilirannya, ini menghasilkan struktur industri yang dangkal dan rentan terhadap gejolak eksternal, yang tercermin dari rendahnya kandungan teknologi lokal, ketergantungan yang tinggi pada barang modal dan input antara dari luar negeri ketimbang dari dalam negeri, serta

lemahnya keterkaitan antar industri. Dan ini dibuktikan dengan gulung tikarnya berbagai perusahaan besar akibat krisis moneter akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Melihat konstelasi struktur dan kinerja industri di Indonesia, masalahnya sekarang adalah: Bagaimana strategi yang sebaiknya diterapkan dalam era globalisasi dan perdagangan bebas mendatang?

Setidaknya ada dua macam strategi dasar yang relevan bagi dunia bisnis di Indonesia mendatang. *Pertama*, karena kata kunci dalam era globalisasi adalah persaingan, maka usaha kecil dan koperasi perlu memusatkan diri pada keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Porter (1991) mengajarkan bahwa perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif dalam satu industri dengan memilih satu di antara tiga generic strategi, yaitu; (1) Kepemimpinan ongkos: menghasilkan dan mendistribusikan produk dengan biaya relatif rendah dibandingkan dengan pesaingnya; (2) Diferensiasi: upaya penciptaan sesuatu yang baru yang dirasakan unik oleh keseluruhan industri; (3) Fokus: perusahaan dapat melayani pasar yang jelas terdefinisi namun sempit secara lebih baik dibandingkan pesaing yang melayani pasar yang lebih luas. Dikenal dua strategi fokus, yaitu: (a) Strategi fokus berdasarkan biaya rendah, yang tergantung pada adanya target segmen yang diinginkan biaya lebih rendah; (b) Strategi fokus berdasarkan diferensiasi yang tergantung pada adanya target segmen yang menginginkan atribut keunikan produk. Pada tingkat internasional atau global, dimensi strategi kompetitif tersebut mencakup ruang lingkup multidomestik ataukah global.

Kedua, apabila peluang untuk bersaing tidak memungkinkan, alternatif yang dapat dipilih adalah melakukan aliansi bisnis. Ide

dasar aliansi adalah daripada bersaing saling mematikan lebih baik bekerja sama saling menguntungkan. Secara umum aliansi strategis dalam skala global dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu (a) Aliansi patungan (*alliance joint venture*), dengan ciri partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah; (b) Aliansi khusus-fungsional (*functional-specific alliance*), dengan ciri tidak terjadi pemisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada satu atau fungsi-fungsi khusus tertentu.

PENUTUP

Demikianlah, dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa masih banyak problematik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi Indonesia mendatang. Uraian di atas merupakan pendekatan atau prediksi bila keadaan dalam jalur yang sudah digariskan dan masih dalam kerangka reformasi yang disepakati. Bila tidak, maka uraian di atas menjadi bias dan kabur. Apalagi dalam ketidakpastian politik dalam negeri yang terus memanas. Bila agenda pemilu tahun 1999 tercapai maka pemerintahan yang baru harus menimba pengalaman dari orde baru. Pembangunan ekonomi harus terus dilanjutkan untuk menghadapi era ke depan era globalisasi.

Pertumbuhan yang tinggi seiring dengan pemerataan harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Pembangunan ekonomi harus menganut strategi *growth with equity*. Artinya pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan per kapita naik, pengangguran mengecil, kemiskinan terkikis, dan kesenjangan pendapatan juga berkurang. Faktor inilah yang menjadi pemicu terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin apabila tidak dilaksanakan dengan benar. Apabila semua ini dilaksanakan dengan benar maka masyarakat madani yang

kita inginkan akan tercapai. Dan terjadinya sistem demokratisasi politik dan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H. 1996. Kinerja Perdagangan Internasional, dan Iklim Investasi Ke Arah Mana kita Bergerak? Dalam Mari Pangestu dan Ira Setiati (Penyunting), *Mencari Paradigma Baru Pembangunan*. Jakarta: CSIS.
- Biro Pusat Statistik. 1995. *Statistik Indonesia 1994*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Hamid, Edy Suandi. 1997. *Kondisi dan Tantangan Ekonomi Bangsa Dalam Menyongsong Abad ke-21*. Yogyakarta.
- Mahfud, Mohammad MD Dkk. 1998. *Tantangan Pembangunan Di Indonesia: Beberapa Pandangan Kontemporer dari Dunia Kampus*. Yogyakarta: UGM.
- Riady, James T. *Jawa Pos*, Tanggal 14 November 1998.